

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
MENURUT FIQH SIYASAH
(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

LATIFATUL AFIFAH

NPM: 1621020022

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
MENURUT FIQH SIYASAH
(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

LATIFATUL AFIFAH

NPM: 1621020022

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)

Pembimbing I : Dr.Jayusman,M.Ag.

Pembimbing II : Frenki, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021**

ABSTRAK

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk sementara waktu dalam mengunjungi suatu tempat ke tempat yang lain dengan suatu perencanaan bukan untuk mencari nafkah pada tempat yang dikunjungi, hanya semata-mata untuk menikmati kegiatan rekreasi. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan aturan dan juga kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat guna mendukung terlaksananya pariwisata yang baik dan juga berkualitas. Namun, yang menjadi permasalahan di wisata Kabupaten Pesawaran adalah kurangnya konektivitas pelayanan dasar pariwisata, kurangnya infrastruktur untuk melayani wisatawan, kebersihan yang tidak terjaga, serta kurangnya pemandu wisata berbahasa asing khususnya selain bahasa Inggris. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam upaya pengembangan kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam fiqh siyasah. Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran. Adapun metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran

sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran. Pemerintah daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah di bidang pariwisata untuk menjadikan tempat wisata yang ada di kabupaten Pesawaran menjadi wisata yang berkualitas dan layak untuk di kunjungi oleh wisatawan. Pemerintah di Kabupaten Pesawaran mempunyai beberapa cara untuk menjadikan pariwisata di Kabupaten Pesawaran sebagai bumi pariwisata tahun 2025 dengan beberapa program unggulan, seperti program ovod (one village one destination), program pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, program fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, program promosi seni budaya dan pameran produk unggulan, serta program pembinaan pada pemilik homestay dan villa. Dinas pariwisata juga telah memberikan fasilitas dan sarana prasarana sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh wisatawan dan masyarakat setempat. Untuk tempat wisata sendiri pemerintah telah memberikan sarana prasarana seperti masjid, toilet, mushola, jalan dalam gang, gapura, tempat sampah dan lain-lain, sedangkan untuk masyarakat sendiri pemerintah telah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok sadar wisata dan pemandu wisata untuk dapat membantu kemajuan wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran. Pandangan fiqh siyasah terhadap Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan kepariwisataan sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah yaitu dengan cara menyediakan kebutuhan wisatawan muslim, seperti menyediakan tempat ibadah, hotel/penginapan, konsumsi, transportasi, dan lokasi wisata. Dinas Pariwisata juga sudah mendirikan musholla dan masjid untuk beribadah umat Islam pada saat berada di lokasi wisata sehingga para wisatawan muslim bisa berwisata tanpa harus meninggalkan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Latifatul Afifah
NPM : 1621020022
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kepariwisata Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, Maret 2021
Yang Menyatakan,



LATIFATUL AFIFAH
1621020022



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. ☎ (0721) 783260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan
Kepariwisata Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada
Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)**

Nama : Latifatul Afifah

NPM : 1621020022

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jayusman, M.Ag

NIP. 197411062000031002

Frenky, M.Si

NIP. 198003122009011017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M. Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. ☎ (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kepariwisata Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)” disusun oleh **Latifatul Afifah**, NPM. 1621020022, program studi: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 April 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Relit Nur Edi, S.Ag, M.H.I**

Sekretaris : **Hendriyadi, S.H.I, M.H.I**

Penguji Utama : **Ghandi Liyorba Indara, S.Ag, MA**

Penguji Pendamping I : **Dr. Jayusman, M.Ag**

Penguji Pendamping II : **Frenki, M.Si**



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa[04]:135)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Wahyul Amin Santoso, S. Ag (Alm) dan Ibu Suryandari, S.Pd yang telah sabar merawat, mendidik, mendo'akan, serta mendukung dan memberikan semangat dalam setiap prosesku. Terimakasih tak terhingga untuk semua usaha, do'a serta kasih sayang yang telah diberikan.
2. Adikku tersayang Dhiya Ulhaq Arrasyid dan Wildan Ahza Atho'llah, yang senantiasa memberi dukungan, Do'a dan semangat untukku.



RIWAYAT HIDUP

Latifatul Afifah, dilahirkan di Bandar Sari Lampung Tengah, pada tanggal 16 Mei 1998, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Wahyul Amin Santoso, S.Ag (Alm) dan Ibu Suryandari, S.Pd.

Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak / RA Roudlotul Athfal yang diselesaikan pada tahun 2004, kemudian penulis melanjutkan ke MI Roudlotul Huda pada tahun 2004-2010. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di Madrasah Tsanawiyah Roudlotul Huda pada Tahun 2010-2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah pada tahun 2013-2016.

Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur undangan SPAN-PTKIN.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kepariwisata Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)”**. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta pengikut-Nya.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik guna menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Penulisan skripsi ini telah berhasil diselesaikan, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yonki Pradikta, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Jayusman, M.Ag Selaku Pembimbing I dan Bapak Frenky, M.Si Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Syariah dan staf perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Ibu Direktur PT Sekawan Indonesia Wisata yaitu ibu Binti Luthfiah S.pd dan bapak Taufiqurrohman S.pd yang telah memberikan pekerjaan untuk ku dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, sehingga sangat membantu untuk keberlangsungan kehidupan ku dan kuliahku.
9. Teman-teman yang menjadi saksi perjalanan kuliah saya selama ini, terimakasih sudah menerima saya menjadi bagian dari kalian, terimakasih untuk dukungan dan semangat yang tak henti, Luthfi Alifah, Deni Yolanda, Asri Mutiara Hati, Indah Maya Sopyana, Elina Putri Ramadhani, Ellemmia Lorenza Pradana
10. Teruntuk Muhammad Teguh Wahyudi, terimakasih tiada kata untukmu dalam perjalanan hidup ini.
11. Terimakasih kepada temanku Ellemmia Lorenza Pradana yang selalu menemaniku untuk mengerjakan skripsi ini
12. Teman-teman jurusan Siyasah khususnya kelas A, terimakasih untuk semua kenangan indah semasa kuliah di UIN Raden Intan Lampung
13. Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
14. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga terselesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, Maret 2021

Latifatul Afifah

1621020022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	8
H. Metode Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	13
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pariwisata	13
2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepariwisataan	19
3. Metode Pengembangan Kepariwisataan	26
4. Pengembangan Kepariwisataan Menurut Fiqh Siyasah	28
B. Tinjauan Pustaka	40

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran	45
B. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.....	51
C. Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Pesawaran.....	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pengembangan Kepariwisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran	67
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam Pengembangan Kepariwisata	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kepariwisata Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Peran adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *actor*¹ yang berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pengembangan kepariwisataan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara

¹Nadjib Zuhdi, *Kamus Lengkap Praktis CBSA 25 Juta* (Surabaya: PT. Fajar Mulya, 1993), h. 615

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1051

³Muchtar Mashud, *Jurnal Media Inovasi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2009), h. 50

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.⁴

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu. Maksudnya adalah Dinas yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertugas mengembangkan kepariwisataan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah mengkaji masalah peran pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan kepariwisataan menurut fiqh siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Secara Objektif

Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa objek wisata yang bagus dan indah serta berpotensi dalam peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar, namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan yang rusak, aliran listrik yang belum maksimal, serta kebersihan yang tidak terjaga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam upaya pengembangan kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah.

⁴Pengertian Pengembangan (On-line), tersedia di <https://www.pengertian-pengembangan.com> (12 Juni 2020)

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia, 2014), h. 4

2) Secara Subyektif

- a. Judul yang berkaitan dengan masalah peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan kepariwisataan yang ditinjau menurut fiqh siyasah sangatlah menarik untuk diteliti dan dikaji.
- b. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis yaitu jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Daerah tempat penelitian sangat mudah untuk dijangkau sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data-data yang diinginkan.

C. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada masa kepemimpinan Bupati H. Dendi Ramadhona Kaligis, S.T.,M.Tr.,I.P sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai sektor fisik maupun non fisik yang secara keseluruhan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan saja, melainkan juga sampai daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan kemajuan pembangunan yang dicapai daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam, flora dan fauna serta beraneka ragam budaya, salah satunya adalah di Kabupaten Pesawaran, yang mana semua hal tersebut dapat memberikan devisa yang cukup besar bagi dunia pariwisata yang akan berdampak pula bagi perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Secara umum pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat mendorong dan juga meningkatkan kegiatan pembangunan, membuka lapangan usaha baru, membuka lapangan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah, apabila dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal oleh pengelola dan juga

pemerintah setempat yang berwenang. Memasuki era globalisasi peranan industri pariwisata harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga profesional agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga apa yang di cita-citakan oleh para pengelola wisata dapat terwujud dengan berlandaskan UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang akan dikelola oleh daerah dan Dinas Pariwisata setempat dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang dikunjungi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan suatu perencanaan bukan untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, hanya semata-mata untuk menikmati kegiatan rekreasi.⁶ Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan di mana objek dan daya tarik wisata tersebut harus mempunyai nilai tambah dan memiliki ciri khas yang membedakan dengan tempat wisata yang lain. Hal tersebut juga merupakan salah satu faktor pendukung pemerintah guna melestarikan tempat wisata tersebut hingga dapat menghasilkan daya jual kepada wisatawan.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 11, Pemerintah pusat dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kepariwisataan, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran untuk pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan

⁶Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, *Sejarah Pariwisata* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), h. 2

⁷Ismayanti, dkk, *Pariwisata dan Isu Kontemporer* (Surabaya: Cv Garuda Mas Sejahtera, 2015) , h. 51

keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.⁸

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan aturan dan juga kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat guna mendukung terlaksananya pariwisata yang baik dan juga berkualitas. Dari beberapa aturan tersebut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah di antaranya yaitu menyediakan informasi tentang kepariwisataan kepada wisatawan dalam negeri (domestic) maupun wisatawan mancanegara serta memberikan perlindungan hukum dan jaminan untuk keselamatan wisatawan yang sedang berwisata. Beberapa perkembangan usaha pariwisata meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memberikan kepastian hukum, melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.

Menurut pandangan Islam, pariwisata diwujudkan dalam hal perjalanan spiritual tentang pemaknaan dan pencapaian sebuah tuntunan ajaran agama itu sendiri yaitu “syahriah” atau disebut juga perjalanan yang tidak setiap saat dilakukan, kenyataan ini telah membuat Negara Arab Saudi memetik banyak keuntungan baik secara material maupun statusnya sebagai sebuah negara yang memiliki tempat yang dianggap suci oleh kaum muslim yakni Mekkah dan Madinah. Gambaran tentang melaksanakan perjalanan dalam Al-Quran tertuang dalam QS. Al-Ankabut ayat 19-20 sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ

النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

⁸Sedarmayanti dkk, *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata* (Bandung : PT Refika Aditama, 2018), h. 24

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan (Makhluk), kemudian dia mengulanginya (kembali). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah “ berjalan di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk) kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”⁹

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa manusia perlu mengadakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah dan kebudayaan manusia.

Adapun beberapa tempat wisata yang sudah dibuka di Kabupaten Pesawaran dan sudah layak untuk dikunjungi oleh wisatawan contohnya adalah Pulau Pahawang, Tegal Mas, dan Pulau Mahitam. Ada juga beberapa tempat wisata yang masih kurang layak yaitu Air Terjun Sinar 3 dan Air Terjun Kembar.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang terdapat pada Bab III tentang prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, di mana prinsipnya adalah memberdayakan masyarakat setempat, karena pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan di wisata Kabupaten Pesawaran adalah kurangnya konektivitas pelayanan dasar pariwisata, kurangnya infrastruktur untuk melayani wisatawan, kebersihan dan kesehatan yang tidak terjaga, dan kurangnya pemandu wisata berbahasa asing khususnya selain bahasa Inggris. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam upaya pengembangan kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fiqh siyash. Karena tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah

⁹Dapartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *Al-Ankabut: 19-20* (Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2006), h. 561

menjalankan, mengatur, dan menjalankan pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tujuan dari kepariwisataan sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis sangatlah tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kepariwisata Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran. Kemudian yang menjadi fokus sub-sub penelitian adalah bagaimana upaya dari pemerintah daerah dalam mengembangkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Pesawaran.

E. Rumusan Masalah

Permasalahan yang di ajukan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran?

F. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran di dalam mengembangkan kepariwisataan.
2. Kegunaan praktis, skripsi ini bisa membantu memecahkan masalah dan bisa memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi Fakultas Syari'ah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁰ Data yang diteliti adalah data proses upaya dari pemerintah daerah

¹⁰Susiadi, *Metodologi Penelitian*, h. 12

dalam mengembangkan kepariwisataan. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer yaitu data yang didapat langsung dari lapangan, sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari buku-buku fiqih dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹¹

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 3 orang dan masyarakat Kabupaten Pesawaran berjumlah 10 orang meliputi pokdarwis (kelompok sadar wisata), pemandu wisata, dan wisatawan dari kabupaten pesawaran.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Tujuan peneliti mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah *Porpositive Sampling* adalah pengambilan

¹¹Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, h. 44.

sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi sampel didalam penelitian ini 13 orang yang terdiri dari masyarakat (berjumlah 10 orang) dan bagian Dinas Kepariwisata Kabupaten Pesawaran (Kepala dinas pariwisata 1 orang, kepala bidang Dinas Pariwisata 1 orang, dan kepala sesi Dinas Pariwisata 1 orang).

3. Data dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden.¹² Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan masyarakat yang ada di Kabupaten Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber bahan kajian yang dikemukakan oleh orang atau tokoh yang hadir pada saat terjadinya peristiwa atau tidak mengalami langsung peristiwa itu, seperti buku teks.¹³

4. Metodologi Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴ Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu

¹²Susiadi, *Metodologi Penelitian...*, h. 98

¹³*Ibid*, h. 98

¹⁴Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, h. 83.

merupakan tulang punggung suatu penelitian survey.¹⁵ Adapun yang diwawancarai atau dimintakan data atau sumber adalah masyarakat Kabupaten Pesawaran dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid terkait upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran mengenai pengembangan sektor kepariwisataan.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Dalam menggunakan metode observasi (pengamatan) cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format-format atau blangko pengamatan sebagai instrument.¹⁷ Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan beberapa tempat wisata yang ada di sana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data-data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti namun melalui dokumen.¹⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen tertulis dalam upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan kepariwisataan.

¹⁵ Mastri Sangarimbun, Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995), h. 192

¹⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian, Ibid*, h. 70

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), h. 272

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian....*, h. 170

5. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Selain itu juga editing adalah salah satu cara untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.¹⁹

6. Metode Analisis data

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁰

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.²¹

¹⁹*Ibid*, h. 12.

²⁰Susiadi, *Metodologi Penelitian, Ibid...*, h. 5

²¹*Ibid*, h.4

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pariwisata

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa sansekerta yang komponen-komponennya terdiri dari “*pari*” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling. “*Wis(man)*” yang berarti rumah, property, kampung, komunitas, dan “*ata*” berarti pergi terus-terusan, mengembara yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan rumah berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan.²²

Organisasi pariwisata dunia, UNWTO mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, dan tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjungi tersebut. Menurut Hunziker dan Krapf dalam Soekadijo, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di suatu tempat untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.²³

Menurut Robinson dalam Piata, pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru.²⁴

Menurut Kurt Morgenoth, pariwisata dalam arti sempit adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan

²² Gamal Suwantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 3

²³ Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 30

²⁴ I Gede Pitama, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 40

tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.²⁵

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil suatu pengertian pariwisata yaitu suatu kegiatan perjalanan yang melibatkan orang-orang dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu yang baru dalam kurun waktu tertentu dan bukan mencari nafkah, dan juga dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Mathieson dan Wall, mengatakan bahwa pariwisata mencakup tiga tipe elemen utama, yaitu:

- a. *Al dynamic element*, yaitu travel ke suatu destinasi wisata.
- b. *A static element*, yaitu singgah di daerah tujuan.
- c. *A consequential element*, atau akibat dari dua hal di atas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.²⁶

Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan pariwisata jika memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu:

- a. Harus bersifat sementara.
- b. Harus bersifat sukarela dalam arti tidak terjadi paksaan.
- c. Tidak bekerja yang menghasilkan upah atau bayaran.²⁷

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya baik alamiah maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai, flora dan fauna, kebun binatang,

²⁵ *Ibid*, h, 42

²⁶ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*...,h. 6

²⁷ Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*...,h. 24

bangunan kuno bersejarah, monument-monument, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya.²⁸

Ruang lingkup pariwisata di antaranya dapat di bagi ke dalam dua kategori yaitu:²⁹

a. Wisata alam, yang terdiri dari:

- 1) Wisata pantai, merupakan kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya. Termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
- 2) Wisata etnik, merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
- 3) Wisata cagar alam, merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran bawah udara dipegunungan, keajaiban hidup binatang yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.
- 4) Wisata buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
- 5) Wisata agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan dan ladang pembibitan dimana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan tinjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman sekitar.³⁰

b. Wisata sosial budaya, yang terdiri dari:

- 1) Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monument, wisata ini termasuk golongan budaya, monument

²⁸ Gamal Suwanto, *Ibid*, h. 13

²⁹ Liga Suryadana dan Vanny Oktavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 30

³⁰ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*...,h. 17

nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti tempat bekas pertempuran yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.

- 2) Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain museum arkologi, sejarah, etimologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industry, maupun dengan tema khusus lainnya.³¹

Sumber daya pariwisata secara umum aktifitas pembangunan ekonomi telah memodifikasi sumber daya dan struktur serta pola konsumsinya, termasuk di dalamnya oleh sektor pariwisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa berjalannya industri pariwisata sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia. Menurut Zimmerman sumber daya diartikan sebagai atribut alam yang bersifat netral sampai ada campur tangan manusia dari luar untuk merubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung.³² Sumber daya yang terkait dengan pengembangan pariwisata umumnya berupa sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya minat khusus, di samping sumber daya manusia. Orang ataupun organisasi menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan pariwisata.³³

³¹ Gamal Suwanto, *Ibid*, h. 21

³² *Ibid*, h. 68

³³ *Ibid*, h. 69

a. Sumber daya alam

Elemen dari sumber daya, misalnya air, pepohonan, udara dan hamparan pegunungan, pantai, bentang alam dan sebagainya, tidak akan menjadi sumber daya yang berguna bagi pariwisata bagi pariwisata kecuali semua elemen tersebut dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, sumber daya memerlukan invensi manusia untuk mengubahnya agar menjadi bermanfaat.

Menurut Fennel, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Lokasi geografis, hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variable lain.
2. Iklim dan cuaca, ditentukan oleh *latitude* dan *elevation* diukur dari permukaan air laut, daratan, pegunungan dan sebagainya.
3. Topografi dan *landsforms*, bentuk umum dari permukaan bumi (topografi) dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa areal geografis menjadi bentang alam yang unik.
4. *Surface material*, menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam.
5. Air, air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai/bahari, danau, sungai, dan sebagainya.
6. Vegetasi, merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi suatu area tertentu.
7. Fauna. Beragam binatang berperan cukup signifikan terhadap aktivitas wisata baik dipandang dari sisi

konsumsi (wisata berburu dan memancing) maupun non konsumsi.³⁴

b. Sumber daya manusia

Faktor sumber daya manusia sangat menentukan eksistensi pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut, Melthos memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman, *shopping*, *travel* dan sebagainya.

c. Sumber daya budaya

Budaya sangat penting peranannya dalam pariwisata. Istilah budaya bukan saja merujuk pada sastra dan seni, tetapi juga pada keseluruhan cara hidup yang dipraktekkan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang di transmisikan dalam suatu generasi ke generasi berikutnya. Sumberdaya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bangunan bersejarah, situs, monument, museum, galeri seni, situs budaya kuno dan sebagainya.
- 2) Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstile, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbit, dan sebagainya.
- 3) Seni pertunjukan, drama, sendra tari, lagu daerah, teater jalanan, eksbisi foto, festival, dan event khusus lainnya.
- 4) Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs dan sejenisnya.
- 5) Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan sanggar, teknologi internasional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat.
- 6) Perjalanan ketempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik (berkuda, dokar, cicar dan lain sebagainya).

³⁴ Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 14.

7) Mencoba kuliner (masakan) setempat. Melihat persiapan, cara membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan straksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan.³⁵

d. Sumber Daya Pariwisata Minat Khusus

Salah satu penyebab terjadinya segmentasi atau spesiasi pasar wisata adalah karena adanya kecenderungan wisatawan dengan minat khusus baik dalam jumlah wisatawan maupun area minatnya. Hal ini sangat berbeda jenis pariwisata tradisional karena calon wisatawan memilih sebuah destinasi wisata tertentu sehingga mereka dapat mengikuti minat khusus dan spesifik yang diminati. Pariwisata dengan minat khusus ini diperkirakan akan menjadi trend perkembangan pariwisata kedepan sebab calon wisatawan telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus, yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan.³⁶

2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepariwisataan

Kepariwisataan (*tourism*) bukanlah hal baru di Indonesia. Kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menetapkan kebijakan pembangunan. Sejak semula pemerintah Indonesia telah menyadari karakter khas dan sifat multidimensi dari kegiatan kepariwisataan, dan karena itu kebijakan kepariwisataan ditempatkan sebagai sub kebijakan tersendiri, yaitu kebijakan kepariwisataan, namun di bawah tugas yang berbeda-beda, tugas paling utama yang harus dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan di suatu destinasi pariwisata adalah melakukan kegiatan “sadar wisata” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pengertian “sadar wisata” di sini bukan berarti pemaksaan kepada para pemangku kepentingan untuk menerima begitu saja ketika wilayahnya di jadikan sebagai destinasi

³⁵ *Ibid*, h. 76

³⁶ Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisataan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm YogyakartaJl. Wonosari Km 7 Sampangan Rt 01/00 Banguntapan, Maret 2016), h.8.

pariwisata. Kegiatan ini seharusnya ditujukan untuk mengidentifikasi seberapa besar kebutuhan masyarakat yang tinggal di destinasi pariwisata terhadap pengembangan kepariwisataan itu sendiri. Wisatawan pada umumnya tidak memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kestabilan kehidupan sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup, di destinasi pariwisata karena mereka bukan pemilik wilayah tersebut. Lain halnya dengan penduduk di wilayah setempat, mereka sangat bergantung kepada kualitas kondisi sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup, karena merupakan pemiliknya dan memiliki hubungan psikologis dan historis yang sangat erat dengan destinasi pariwisata.³⁷

Pariwisata selalu menjadi sektor yang terus dikembangkan pemerintah. DPR RI telah menetapkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menggantikan UU No. 9 Tahun 1990. Secara regulatif, undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar dapat membantu terciptanya industri pariwisata yang berkelanjutan. Undang-undang sebelumnya dianggap tidak mampu untuk menjawab tantangan dan harapan kedepan bagi pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata dapat dikatakan bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang paling bawah, karena masyarakat itulah yang akan melakukan kontak langsung dengan para wisatawan asing. Untuk itulah UU No.10 Tahun 2009 ini ditetapkan, sehingga para pengrajin, para pemandu wisata, dan para pelaku wisata kecil dan menengah dapat dibina dan dikembangkan sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁸

Menurut UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 1 angka 1 dan angka 2, wisata adalah kegiatan perjalanan

³⁷ Basuki Antariksa, *Penegakan Hukum Pariwisata di DKI Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011), h. 5

³⁸ Aditya Yuli, *Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia)*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol. 5 No. 1 (Januari 2011), h. 51

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

Berdasarkan sifat perjalanan, lokasi dimana perjalanan dilakukan, wisatawan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

d. Wisatawan Asing (*Foreign Tourist*)

Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara di mana ia biasanya tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau disingkat wisman.

e. *Domestic Foreign Tourist*

Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara-negara di mana ia tinggal. Misalnya, staf kedutaan Belanda yang mendapat cuti tahunan, tetapi ia tidak pulang ke Belanda tetapi malah melakukan perjalanan wisata di Indonesia (tempat ia bertugas).

f. *Domestic Tourist*

Seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Misalnya warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Bali atau ke Danau Toba, wisatawan ini disebut juga wisatawan dalam negeri atau wisatawan nusantara (wisnus).

c. *Indigenous Foreign Tourist*

Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya warga negara Perancis yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di Indonesia, ketika liburan ia kembali ke Perancis dan melakukan perjalanan wisata di sana.

d. *Transit Tourist*

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu, yang terpaksa mampir atau singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri.

e. *Business Tourist*.³⁹

Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis, bukan wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya yang utama selesai. Jadi, perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan.

Pada Pasal 4 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus dapat dipertahankan, karena objek wisata merupakan ciri khas suatu negara. Pengembangan faktor penunjang objek wisata harus terus ditingkatkan dan diperhatikan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.⁴⁰ Peningkatan terhadap faktor penunjang akan memudahkan akses pengunjung untuk datang ke objek-objek wisata yang ada.

Jenis usaha pariwisata dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha pariwisata meliputi:

³⁹ Yusac L. Diyono, *Materi Kuliah Introduction To Tourism, (Pengantar Pariwisata)*, Untag Semarang, www.scribd.com, diakses 14 Oktober 2018.

⁴⁰ Sarsiti dan Muhammad Taufiq, *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 (Januari 2012), h. 28

- a. Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b. Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- c. Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- d. Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan meliputi usaha penyedia jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumentasi perjalanan.
- e. Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan. Untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, cafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
- f. Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup usaha kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- h. Penyelenggaraan pertemuan , perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya. Serta

menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

- i. Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
- j. Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k. Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- l. Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
- m. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan pelayanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan minuman sehat, dan oleh aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.⁴¹

Menurut UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sudah mengatur tentang hak dan kewajiban wisatawan dan pengusaha pariwisata. Pasal 20 mengatur mengenai hak wisatawan, antara lain: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan, sesuai dengan standar hukum dan perlindungan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi. Sementara pada pasal 25 mengenai kewajiban wisatawan, antara lain: menjaga dan menghormati, norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai

⁴¹ *Ibid*, h.17

yang hidup dalam masyarakat setempat. Memelihara dan melestarikan lingkungan, turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar segala kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.⁴²

Menurut Pasal 22 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata hak-hak pengusaha pariwisata antara lain: mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan, membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa kewajiban pengusaha pariwisata menurut pasal 26 antara lain: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan kenyamanan, keramahan, dan keselamatan wisatawan. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi, mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan, mengutamakan menggunakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat, turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya, memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri, memelihara lingkungan alam dan budaya, menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab

⁴² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 20

dan menerapkan standar usaha kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Metode Pengembangan Kepariwisataaan

Menurut Yoeti, pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada disekitar. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang mantap sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya.⁴³

Menurut Yoeti, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya. Oleh karena itu sebelum seorang wisatawan melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan prasarana dan sarana pariwisata seperti berikut:

- a. Fasilitas transportasi
- b. Fasilitas akomodasi
- c. Fasilitas Catering Service
- d. Aktivitas rekreasi
- e. Fasilitas pembelian
- f. Tempat.⁴⁴

Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam

⁴³ Syafira Ryalita Primadany, Analisis Strategi Pengembangan Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1. No. 4 Malang, h. 139

⁴⁴ *Ibid*, h. 327

pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata terbagai menjadi tiga bagian penting, yaitu:

- a. Sarana pokok pariwisata seperti hotel, villa, dan restoran.
- b. Sarana pelengkap pariwisata seperti wisata budaya dan wisata alam.
- c. Sarana penunjang pariwisata seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah.⁴⁵

Upaya dalam pengembangan pariwisata tentu harus memperhatikan hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Prasarana tersebut antara lain:⁴⁶

- a. Perhubungan : jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal.
- b. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
- c. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegram, radio, televisi, kantor pos dan lain-lain.
- d. Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah sakit.
- e. Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objek wisata.
- f. Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi atau kantor pemandu wisata.
- g. Pom bensin, dll.⁴⁷

Kegiatan pariwisata banyak yang memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya. Alam yang indah sangat potensial untuk kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan budaya suatu daerah

⁴⁵ Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 25

⁴⁶ Oka A Yoeti, *Pemasaran Pariwisata Terpadu*, (Jakarta: Angkasa Bandung, 1996), h. 78

⁴⁷ Ibid, 210

juga sangat potensial untuk pariwisata. Berbagai tarian adat, rumah adat, seni musik, makanan khas daerah merupakan contoh budaya yang potensial untuk kegiatan wisata. Berbagai bangunan bersejarah dan bernilai seni seperti candi, dan benteng juga banyak dimanfaatkan untuk wisata. Indonesia sedang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan membuka wisata-wisata baru. Dengan adanya objek wisata banyak mendatangkan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan banyaknya kunjungan berarti meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu dibukanya objek wisata juga banyak membuka peluang usaha ditempat wisata, antara lain berdagang souvenir, sewa tikar, jasa foto, transportasi dan lain-lain.⁴⁸

4. Pengembangan Kepariwisata Menurut Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah gabungan dari dua kata yang berbeda yaitu fiqh dan siyasah. Agar dapat dipahami maka perlu dijelaskan maksud atau pengertian dari masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fiqh secara etimologi yaitu keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara. Dengan kata lain istilah fiqh dari segi bahasa ialah pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Sedangkan secara termonologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya *tafshil*. Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari dalil al-Qur'an dan Hadits yang disusun oleh mujtahid dengan penalaran ijtihad. Dengan kata lain fiqh diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum Islam.⁴⁹

Selanjutnya, kata siyasah secara etimologi berasal dari kata sasa, yang berarti mengurus, mengatur, serta

⁴⁸ Ismayanti, *Pengantar Kepariwisata*, (Jakarta: Grafindo, 2000), h. 44

⁴⁹ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.21-22

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut kata *siyasah* memiliki arti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pengawasan, pengurusan, perekayasaan, pembuatan kebijakan, dan arti lainnya. Secara tersirat, dalam pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang saling berkaitan: (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Maka, *al-siyasah* diartikan: memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.⁵⁰

Secara terminologis dalam buku karangan Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada banyak dikemukakan oleh para yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil *siyasah* adalah “Suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.” Selanjutnya menurut Husain Fauzy al-Najjar definisi *siyasah* adalah “Pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.” Dan menurut Ibn Manzhur definisi *siyasah* adalah “Mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.”⁵¹

Berdasarkan pengertian secara etimologi dan terminologi yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan definisi *fiqh siyasah* yaitu ilmu tata negara Islam secara lebih khusus membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berdasarkan syariat, guna

⁵⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 25-26

⁵¹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 9-10

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan terhindar dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵²

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Dalam buku Muhammad Iqbal menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara). Adapun imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara dalam kitab yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* Abd al-Wahhab Khallaf lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian, yaitu hubungan internasional, keuangan negara dan peradilan.⁵³

Namun, berbeda dengan tiga tokoh diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.m.hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu: Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan), Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum), Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan), Siyasah Maliyyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter), Siyasah Idariyyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara), Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (Politik Hubungan Internasional), Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-

⁵² *Ibid*, h.11

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),h.14

undangan), Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh di atas, ruang lingkup fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian. Pertama, politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), bidang ini meliputi ,kajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah), bagian ini meliputi hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara yang non muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-khashsh) atau bisa juga disebut dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik anatara negara muslim dan negara non-muslim (al-siyasah al-duali al-'amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (Siyasah Maliyyah), bidang ini mencakup sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak politik, pajak, dan perbankan.⁵⁴

c. Hubungan Antara Pemerintah dengan Rakyat Menurut Fiqh Siyasah

Pada sistem pemerintahan di dalam agama Islam seperti khalifah, kepala negara atau imam adalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjama'ah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjama'ah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman maupun ketakwaannya dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut seorang imam memimpin shalat hanya berjarak beberapa

⁵⁴ *Ibid*, h.15-16

langkah di depan makmim. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam seandainya imam keliru dalam shalat, kemudian makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.⁵⁵

Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah, karenanya pemerintah tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Seorang pemerintah harus bisa mendengarkan aspirasi rakyat dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Contoh terbaik tentang pemerintah setelah Nabi Muhammad Saw adalah Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai khadim al ummah (pelayan umat) yang mengatur dan menguru kepentingan umat Islam.⁵⁶

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa kepala negara tidak kebal hukum dan harus mau berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan pemerintah tidak beda dengan umat islam lainnya. Ia memperoleh kehormatan kemuliaan dan kehormatan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena ia mempunyai kedudukan untuk memimpin dan memerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawabnya. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, pemerintah juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah juga dapat dikenakan hukum pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya.⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),h.243

⁵⁶ *Ibid*, h.240-242

⁵⁷ *Ibid*, h.242

Orientalis Bernard Lewis menyebutkan tugas dari pemerintah meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya, yaitu membela kepentingan rakyat, melindungi rakyat dari serangan-serangan musuh, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat.⁵⁸

Kewajiban pemerintah dapat pula dikembangkan pada pemeliharaan dan penghormatan hak-hak asasi rakyatnya. Dalam hal ini rakyat dapat memperoleh perlindungan untuk mengekspresikan sikap dan pendapatnya secara bebas. Menurut Audah, hak-hak kepala negara yang wajib dipelihara pemerintah yang ditetapkan dalam Islam jauh sebelum Barat mendengungkannya adalah hak persamaan dan kemerdekaan. Dalam hak kemerdekaan Al-Qurán menegaskan bahwa Allah menciptakan ras, bangsa, warna kulit, dan bahasa adalah untuk saling mengenal dan bekerjasama. Perbedaan di sisi Tuhan hanyalah pada ketakwaan, di samping itu Nabi Muhammad Saw juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dan non Arab, antara kulit putih maupun hitam. Mereka semua sama laksana sisir.

Sebaliknya apabila seorang pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemerintah juga memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Menurut Al-mawardi, hak pemerintah atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu: hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Al-mawardi memberikan indikasi bahwa tidak bolehnya rakyat taat kepada pemerintah jika pemerintah berlaku tidak adil dalam memimpin dan saat hilangnya kemampuan fisiknya. Adapun hilangnya kemampuan fisik seorang pemerintah antara lain

⁵⁸ *Ibid*, h.243

disebabkan hilangnya fungsi pancaindera, cacatnya anggota badan, dan hilangnya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (tidak cakap hukum).⁵⁹

Adapun hilangnya kecakapan hukum seorang pemerintah antara lain disebabkan oleh pengaruh dari orang-orang yang ada di dekatnya yang menguasai pemerintah dan arena di tawan oleh musuh-musuh dalam Islam. Dalam keadaan demikian pemerintah dapat diberhentikan. Menurut Taqiyuddin Al Nhabani pemerintah dapat di makzulkan dari jabatannya apabila terdapat salah satu dari tiga hal berikut, yaitu murtad, gila atau ditawan oleh musuh yang kuat yang dia tidak mungkin melepaskan diri dari tawanan tersebut.⁶⁰

c. Pariwisata dalam Pandangan Islam

Pariwisata dalam Islam adalah sifat untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati keindahan alam sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT dan motivasi menunaikan hidup. Dalam konsep Islam perjalanan manusia dengan maksud dan kepentingan tertentu dipermukaan bumi (berpariwisata) harus diiringi dengan keharusan untuk memperlihatkan dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanannya.⁶¹

Sementara itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai ideal dari kepariwisataan bagi Islam adalah bagaimana umatnya mengambil *i'tibar* atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan seperti diisyaratkan dalam Al-Qur'an Q.S. Saba' ayat 18:

⁵⁹ Al- Mawardi, Al- Ahkam Al- Sulthaniyah, h.17

⁶⁰ Taqiyuddin Al Nhabani, Sistem Pemerintahan Islam, Terjemahan Muhammad Maghfur Wachid (Bangil: Al Izzah,1996), h. 135

⁶¹ Aisyah Oktaviani, *Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 36

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَهَرَ وَقَدَرْنَا

فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾

“dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman”

Menurut ayat di atas, perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu di permukaan bumi harus diiringi dengan kehati-hatian.

Islam pada dasarnya membahas masalah hubungan terhadap tiga pokok yaitu:

- a. Tuhan.
- b. Alam.
- c. Manusia.

Oleh karena itu, agama yang meliputi segala hal atau *kaffah*, memberikan pertimbangan terhadap aktivitas hidup di dunia modern tidak bisa terlepas dari tiga hal pokok diatas, termasuk dunia kepariwisataan. Dunia kepariwisataan termasuk sub sistem kehidupan yang merupakan salah satu aspek dari muamalah atau kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan budaya.

Berpariwisata mengenal keagungan Allah SWT, berpariwisata melihat keagungan-Nya, berpariwisata mengenal betapa keindahan dan kekayaan dunia yang sebenarnya. Wisata juga ditunjukkan sebagai sebuah cermin mempelajari sebab-sebab kemajuan dan kemunduran, baik pelajaran itu melalui cermin diri atau kisah dari orang lain. Pada gilirannya, siapa tahu nanti kita dapat hijrah, hijrah dari kejahiliahan menuju kearifan, hijrah dari kesombongan dan menjadi kerendahan hati, hijrah dari kemaksiatan kepada kesalehan. Keindahan rasa dekat dengan Allah SWT. Sang

maha segala-galanya dan kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan harapan setiap insan.⁶²

Dalam kajian Islam, wisata dapat dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu:

a. Wisata Rohani

Wisata rohani merupakan suatu perjalanan kesuatu tempat yang dilakukan untuk sementara waktu dengan tujuan mencari kepuasan sekaligus pendekatan diri kepada sang pencipta. Contoh wisata rohani adalah masjid yang dijadikan objek wisata rohani atau kunjungan ke tempat-tempat makam wali.

b. Wisata Jasmani

Wisata jasmani dapat berupa menyaksikan keajaiban fenomena alam dan pengaturan yang sangat tepat dan serasi yang meliputi semuanya. Manusia bisa menganggap keagungan, kebesaran, kebijaksanaan, kekaguman pada sang pencipta. Kemudian manusia akan merasa takjub dan terpesona, memuji dengan pujian yang paling dalam pada ciptaan Allah SWT.

Pariwisata syari'ah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu pariwisata syari'ah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat Allah SWT.

Wisatawan muslim merupakan segmen baru yang sedang berkembang dengan pesat dalam industri pariwisata. Menjelajahi dunia seperti wisatawan lain dengan tidak mengorbankan kebutuhan dasar mereka berupa pemenuhan makanan halal dan kemudahan pelaksanaan ibadahnya berupa shalat. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan pariwisata syari'ah merupakan seluruh kegiatan seperti wisata tersebut, akan tetapi wisatawan tidak meninggalkan syari'ah Islam. Jadi secara umum

⁶² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 115

pariwisata syari'ah dan pariwisata konvensional tidak beda, hanya kebutuhan terhadap paket wisata, akomodasi, makanan dan minuman dalam memenuhi nilai-nilai Islam yang ada. Terdapat beberapa faktor standar pengukuran pariwisata syari'ah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisata dimana hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri yaitu:

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- d. Rumah makan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- e. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
- f. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
- g. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam.⁶³

Syakiry mengatakan konsep pariwisata syari'ah tidak terbatas pada wisata religi, tetapi meluas kesegala bentuk pariwisata kecuali yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Pariwisata syari'ah adalah segala macam jenis pariwisata yang menanamkan prinsip-prinsip syari'ah di dalamnya dan dapat diperuntukkan kepada siapa saja.⁶⁴

Pariwisata syari'ah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makam ulama, mengunjungi masjid-masjid peninggalan sejarah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syari'ah bukan hanya wisata ziarah dan semua yang disebutkan tersebut, melainkan pariwisata syari'ah adalah tren baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam atau di sebut juga dengan wisata halal.

⁶³ Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 58

⁶⁴ Syarifuddin, *Analisis Produk Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya*, (Skripsi Program Ekonomi Syariah: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), h. 131

Sejalan dengan dijalankannya syari'ah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. Maka prinsip dalam pariwisata syari'ah harus didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan semangat keberagaman dengan cara menghibur.⁶⁵

Dalam pengembangan pariwisata terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan oleh Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran untuk menunjang pariwisata syari'ah yaitu:

a. Lokasi

Penerapan sistem Islami di area pariwisata atau lokasi pariwisata yaitu dipilih yang sesuai dengan hal hal yang diperbolehkan di dalam kaidah Islam dan dapat meningkatkan spiritual wisatawan muslim. Hal ini dilakukan karena jumlah wisatawan setiap tahunnya meningkat, baik itu wisatawan non muslim maupun wisatawan muslim. Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran perlu memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan muslim agar tetap bisa berwisata tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim.

b. Transportasi

Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga tetap sesuai dengan syariat Islam dan terjaga kenyamanan wisatawan. Pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan sangatlah diperlukan guna menghindari adanya kedekatan maupun kontak fisik yang disengaja maupun tidak di sengaja bagi wisatawan laki-laki dan perempuan.

c. Konsumsi

Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang di dalam Q.S Al-Maidah ayat 3:

⁶⁵ *Ibid*, h. 33

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۚ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٧﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Segi kehalalan di sini baik dari sifatnya, perolehannya, maupun pengolahannya. Selain itu, satu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.

Dinas Pariwisata dan pengelola wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran berperan aktif dalam penyediaan konsumsi untuk para wisatawan yang datang. Dalam keadaan ini kehalalan makanan sangatlah penting untuk menjamin mutu dan kualitas dari ketelitian para pengelola wisata. Karena saat ini sudah banyak sekali wisatawan muslim yang turut serta berwisata sehingga kaidah kaidah islam yang mereka pegang harus kita jaga bersama-sama.

4. Hotel

Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. Menurut Rosenberg pelayanan di sini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan yang sebaiknya harus terpisah. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan pengelola wisata telah banyak menyediakan tempat penginapan, sehingga tidak khawatir kekurangan tempat yang dapat mengakibatkan perkumpulan di satu tempat yang sama antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.⁶⁶

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan didalam tabel dibawah ini:

Nurfadila, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2017, dengan judul “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah (Dinas Pemuda dan Pariwisata) dalam pengelolaan sektor pariwisata adalah melengkapi sarana dan prasarana

⁶⁶ *Ibid*, h.33

penunjang pariwisata. Faktor yang mempengaruhi pengembangan objek wisata adalah factor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan banyaknya potensi pariwisata di daerah tersebut , sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dana, serta akses menuju objek wisata yang masih kurang bagus.⁶⁷ Dalam skripsi ini penulis sama-sama membahas tentang pengelolaan pariwisata untuk mengembangkan potensi wisata yang sudah ada di daerah masing-masing (Kabupaten Pesawaran), tetapi ada beberapa perbedaan dalam penulisan skripsi ini, jika Nurfadila lebih membahas pada peranan pemerintah dalam melengkapi kebutuhan wisatawan seperti sarana dan prasarana secara umum, sedangkan penulis juga memasukkan tentang peranan pemerintah dari sudut pandang fiqih siyasah, sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang juga banyak beragama islam contohnya sarana dan prasarana ibadah di tempat wisata, sehingga wisatawan bisa tetap menjalankan kewajibannya ketika sedang berwisata.

Resky Sirupang Kanuna, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2019, dengan judul “Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dalam mengelola sektor pariwisata adalah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Jenis pariwisata yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah objek budaya. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan potensi pariwisata adalah faktor pendukung yaitu objek wisata

⁶⁷ Nurfadila, “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2010)

yang sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas, partisipasi masyarakat dan koordinasi pemerintah dengan pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dana, lokasi geografis, objek wisata, serta minim dan tidak terpusatnya informasi.⁶⁸ Dalam hal ini penulis sama-sama membahas tentang pengembangan potensi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah, jika Resky Sirupang Kanuna lebih membahas pada objek wisata budaya yang dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah, penulis lebih membahas pada objek wisata alam yang ada di Kabupaten Pesawaran karena jauh lebih banyak potensi wisata alam dibandingkan dengan objek wisata budaya. Objek wisata alam menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat khususnya para pengelola wisata seperti pokdarwis (kelompok sadar wisata), tour guide, dan juga para pengusaha biro jasa. Karena sampai saat ini untuk pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata belum ada yang masuk ke pemerintah, sehingga pemerintah akan membuat perjanjian yang bisa mengikat para pengelola wisata di Kabupaten Pesawaran untuk dapat memberikan sebagian dari hasil pengelolaan wisata yang di dapat dari wisata di Kabupaten Pesawaran.

Miranda Wulandari Mantouw, Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta tahun 2018, dengan judul “Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Yogyakarta”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melakukan komunikasi ke berbagai pihak, salah satunya dengan PT Telkomsel Indonesia, komunikasi antar dinas dengan PT Telkomsel Indonesia adalah untuk melakukan kerjasama dalam melakukan promosi pariwisata. Kerjasama tersebut yaitu dengan mengembangkan aplikasi telepon cerdas

⁶⁸ Resky Sirupang Kanuna, “Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014)

yaitu Hi Jogja, aplikasi ini berisi informasi yang berhubungan dengan seluruh pariwisata yang ada di Yogyakarta. Struktur organisasi yang secara utuh mengatur kebijakan pariwisata kota Yogyakarta tersebut adalah Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, khususnya di seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata. Bidang inilah yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta.⁶⁹ Dalam hal ini penulis sama-sama membahas tentang peran pemerintah dalam melakukan promosi pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing. Jika pemerintah di Kota Yogyakarta bekerjasama dengan PT Telkomsel Indonesia untuk melakukan promosi pariwisata melalui telpon genggam Hi Jogja, pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan promosi untuk pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran dengan cara promosi online, membuat pamflet-pamflet, media sosial, dan juga melalui komunitas seperti komunitas sepeda, komunitas diving dll yang ada di Lampung dan di luar Lampung guna membantu pemerintah dalam memasarkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran sehingga dapat memikat daya tarik wisatawan nusantara bahkan wisatawan luar negeri untuk dapat berwisata di Kabupaten Pesawaran.

⁶⁹ Miranda Wulandari Mantouw, "Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Yogyakarta". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta tahun 2018)

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Yuli, Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia), Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 (Januari 2011)*
- Aisyah Oktaviani, Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016)*
- Anis Purnawatiningsih, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020
- Annis P.N, (Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata), wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020.
- Annis P.N, S.H., M.H. (Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata), wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020.
- Aris Apriadi, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020
- Azhari, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020.
- Basuki Antariksa, *Penegakan Hukum Pariwisata di Dki Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011)*
- Dapartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *Al-Ankabut: 19-20* (Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2006)
- Dapit Alfano, Wawancara dengan Penulis, Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pesawaran, 14 Maret 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Eko Rudianto, Wawancara dengan Penulis, Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pesawaran, 14 Maret 2021

Fahdian, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020

Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2001)

Gede Pitama, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 40

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Hendayani, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia, 2014)

Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta Jl. Wonosari Km 7 Sampangan Rt 01/00 Banguntapan, Maret 2016)

Ismayanti, dkk, *Pariwisata dan Isu Kontemporer* (Surabaya: Cv Garuda Mas Sejahtera, 2015)

Ismayanti, *Pengantar Kepariwisata*, (Jakarta: Grafindo, 2000)

J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)

Kamil, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Tahun 2019, h.15

Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Linda Emilda, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020

Mashud, Muchtar, Jurnal Media Inovasi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2009)

Mastri Sangarimbun, Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995)

Miranda Wulandari Mantouw, "Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Yogyakarta". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta tahun 2018)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2008)

Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Nurfadila, "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang". (Skripsi Program

Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2010)

Okta A Yoeti, *Pemasaran Pariwisata Terpadu*, (Jakarta: Angkasa Bandung, 1996)

Pengertian Pengembangan (On-line), tersedia di <https://www.pengertian-pengembangan.com>

Program Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Tahun 2015

Resky Sirupang Kanuna, “Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014)

Rosidi, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020

Rosidi, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020

Rosidi, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020

Sarsiti dan Muhammad Taufiq, *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 (Januari 2012)

Sedarmayanti dkk, *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata* (Bandung : PT Refika Aditama, 2018)

Simanjuntak ,Bungaran Antonius, dkk, *Sejarah Pariwisata* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015)

Sri Rahayu, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014)

Syafira Ryalita Primadany, Analisis Strategi Pengembangan Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1. No. 4 Malang

Syarifuddin, *Analisis Produk Pelayanan dan Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Syariah Wali Songo Surabaya*, (Skripsi Program Ekonomi Syariah: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

Thaqiyuddin Al Nhabani, Sistem Pemerintahan Islam, Terjemahan Muhammad Maghfur Wachid (Bangil: Al Izzah, 1996)

Thaqiyuddin Al Nhabani, Sistem Pemerintahan Islam, Terjemahan Muhammad Maghfur Wachid (Bangil: Al Izzah, 1996)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Pasal 20

Wahyu Arifin, Wawancara dengan Penulis, Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pesawaran, 14 Maret 2021

Yosi Anggara, Wawancara dengan Penulis, Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pesawaran, 14 Maret 2021

Yudiana, Wawancara dengan penulis, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 20 November 2020.

Yusac L. Diyono, *Materi Kuliah Introduction To Turism*, (Pengantar Pariwisata), Untag Semarang, www.scribd.com, diakses 14 Oktober 2018.

Zuhdi, Nadjib, *Kamus Lengkap Praktis CBSA 25 Juta* (Surabaya: PT. Fajar Mulya, 1993).